

**PENGGORGANISASIAN KELOMPOK
TANI DALAM MEMPERJUANGKAN
PERHUTANAN SOSIAL (STUDI KASUS
PENGGORGANISASIAN STAM DI DESA
MENTASAN, KECAMATAN
KAWUNGANTEN, KABUPATEN
CILACAP)**

Jurnal Analisa Sosiologi

Agustus 2020, 9 (Edisi Khusus:

Implementasi Inovasi di Era

Disrupsi): 376-395

Titin Marliyana¹

Abstract

Forest can be considered as rich natural resources, but many people who lives near the forest is living in poverty because of agrarian conflicts and wrong management of the forest by Perhutani. StaM organized farmers group to resolve the agrarian conflicts in Cilacap regency. Mantasan village experiences some problems with Perhutani, and STaM conducts assistancing program by proposing Social Forestry. From the explanation above, researcher wants to investigate the motivation of StaM doing the organizing program, how the organizing program is carried, and the difficulty in carrying the organizing program. Social Movement theory from Tarrow is used to investigate the organizing program which can be a social movement. Qualitative study with case study approach is conducted to answer the research questions. Research participants are selected by using purposive sampling method. The data in this research will be collected through interview and supporting documment. Technique of data collection will be conducted through observation, interview, and documentation. The data validity will be tested by carrying out triangualtion of data source and data analysis of Miles and Huberman interactive model. The results of the research reveal that the need of the farmer is causing certain behaviour which lead them to form farmers group to fullfill the farmers' need. Organizing program is carried out to fight the powerless farmer to create some changes for the farmer can adapt to resolve their problems. Organizing program is carried out because there are problem and potential solution, intervention to the direction of change, and people who involved in intervention. To carry out Organizing Program, StaM considers the principle, the model, the media and the procedure of organising. The difficulties found in this research are agrarian reformation issue which become the sensitive issue, farmers group who's experiencing burnout, the lack of cooperativeness from the government, and the lack of respond from the society to change.

Keywords: *Agrarian Conflict, Community Organizing, Social Forestry.*

¹Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret

¹titinmarliyana04@gmail.com

Artikel yang diterbitkan Jurnal Analisa Sosiologi pada edisi khusus Implementasi Inovasi di Era Disrupsi ini telah memenuhi syarat-syarat karya ilmiah, diproses sama seperti pada penerbitan non edisi khusus (terbitan normal).

Abstrak

Hutan merupakan sumber daya alam tergolong kaya, namun banyak masyarakat sekitar hutan dalam kategori miskin akibat adanya konflik agraria dan pengelolaan hutan yang salah oleh Perhutani. STaM melakukan pengorganisasian pada kelompok tani untuk menyelesaikan konflik agraria di Kabupaten Cilacap. Desa Mentasan mengalami konflik dengan perhutani dan STaM melakukan pendampingan dengan mengusulkan perhutanan sosial. Peneliti ingin mengetahui motivasi STaM melakukan pengorganisasian, bagaimana pengorganisasian dilakukan, dan kendala yang dihadapi dalam melakukan pengorganisasian. Teori gerakan sosial dari Tarrow digunakan untuk melihat pengorganisasian yang dilakukan menjadi sebuah gerakan sosial. Metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Infoman penelitian ditentukan melalui purposive sampling. Data diperoleh melalui wawancara langsung dan dokumen pendukung. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Validitas data melalui teknik triangulasi sumber dan analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kebutuhan petani, menyebabkan tingkah laku untuk membentuk kelompok tani dengan tujuan memenuhi kebutuhan petani. Pengorganisasian dilakukan untuk melawan ketidakberdayaan petani guna menciptakan perubahan agar petani mampu beradaptasi menghadapi permasalahannya. Pengorganisasian dilakukan karena adanya persoalan dan potensi penyelesaian, intervensi ke arah perubahan, dan pihak yang terlibat dalam intervensi. Dalam melakukan pengorganisasian, STaM mempertimbangkan prinsip pengorganisasian, bentuk model dan media pengorganisasian, dan langkah-langkah maupun tahapan pengorganisasian. Kendala yang dihadapi yaitu isu reforma agraria merupakan isu yang sangat sensitif, kelompok tani mengalami kejenuhan, kurangnya kerjasama dari aktor-aktor pemerintahan, dan kurangnya respon dari masyarakat untuk menuju perubahan.

Kata kunci: Konflik Agraria, Pengorganisasian Masyarakat, Perhutanan Sosial.

PENDAHULUAN

Hutan merupakan sumber daya alam yang berperan penting bagi kehidupan manusia, karena mampu menghasilkan barang maupun jasa, serta menciptakan kestabilan lingkungan (Steinlin, H. 1988). Hutan di pulau Jawa dikelilingi ±6.807 desa dengan jumlah penduduk 13.410.384 KK. Masyarakat tersebut bermukim di daerah yang dekat dengan sumber daya alam tergolong kaya yaitu hutan, namun masih terdapat sekitar 60% tergolong kategori miskin karena rata-rata kepemilikan lahan <0,5/KK (Ardiansyah, 2016). Kemiskinan tersebut diduga karena rakyat semakin kehilangan akses terhadap tanah dan munculnya konflik agraria berupa perselisihan tanah ditingkat rumah tangga petani, meningkatnya penguasaan

tanah dalam skala besar, hingga tata ruang yang tumpang tindih (Winata, 2019).

Siti Nurbaya selaku Menteri LHK (2019), mengungkapkan bahwa pilihan yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut melalui reforma agraria dan perhutanan sosial dengan memberikan legalitas pada masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan hutan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sekaligus menjaga kelestarian lingkungan (Winata, 2019). Reforma agraria adalah suatu penataan kembali susunan pemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria (terutama tanah), untuk kepentingan rakyat kecil (petani, buruh tani, tunakisma, dll), secara menyeluruh dan komperhensif (Wiradi, 1995). Implementasi reforma agraria tidak dapat dipisahkan dari perhutanan sosial sebagai program yang bertujuan untuk pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan ekonomi melalui tiga pilar yaitu lahan, kesempatan usaha, dan sumber daya manusia. Perhutanan sosial merupakan program negara yang memberikan pengelolaan hutan kepada rakyat yang bisa dikelola secara kolektif selama 35 tahun untuk menjadikan hutan tersebut lestari dengan sistem bagi hasil yang diatur dalam Perpres No. 86 Th 2018 dan Permen LHK No. P.39 Th 2017 (Ridlo, 2019).

Kabupaten Cilacap memiliki hutan seluas 108.142.94 Ha dengan luas hutan negara 50.672.94 Ha dan luas hutan rakyat 57.470.00 Ha. (BPS, 2018). Anggota Komisi A DPRD Cilacap, Romelan (2019) membenarkan Cilacap bakal menjadi daerah percontohan reforma agraria di Jawa Tengah. Kaitannya dengan TORA, Kabid BPN menyampaikan bahwa Cilacap akan menjadi pilot project untuk program reforma agraria melalui skema perhutanan sosial, karena masyarakat Cilacap dinilai aktif dalam mengupayakan penyelesaian sengketa lahan atau yang terjadi (Ridlo, 2019). Salah satu sengketa agraria yang terjadi di Cilacap yaitu seperti di desa Grugu yang pascatragedi DI/TII tahun 1965 warga dipaksa pindah demi alasan keamanan dengan janji kepemilikan lahan alias tukar guling. Tetapi nyatanya, tanah tukar guling yang dijanjikan tidak terealisasikan dan justru disegel atas nama Perhutani. Akhirnya, petani mengajukan perhutanan sosial yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatasi sengketa lahan yang terjadi apabila redistribusi tanah tidak dapat dilakukan (Ridlo, 2019).

Upaya penyelesaian sengketa lahan di Cilacap dapat terlaksana dengan baik karena adanya campur tangan dari Organisasi masyarakat bernama Serikat Tani Mandiri (STaM). STaM telah banyak melakukan pendampingan kepada kelompok tani dalam kasus sengketa pertanahan melalui program reforma agraria maupun perhutanan sosial. Salah satu desa yang didampingi oleh STaM dalam pengajuan program perhutanan sosial adalah desa Mentasan.

Dari pemaparan di atas, peneliti ingin mengetahui motivasi yang mendorong STaM melakukan pengorganisasian kepada kelompok tani untuk memperjuangkan perhutanan sosial, bagaimana pengorganisasian yang dilakukan, hingga kendala yang dihadapi STaM dalam melakukan pengorganisasian kepada kelompok tani.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian berada di desa Mentasan, yang dilaksanakan mulai dari Desember 2019-Januari 2020. Metode kualitatif digunakan untuk mengetahui secara mendalam pengorganisasian yang dilakukan STaM pada kelompok tani. Studi kasus untuk melihat yang khas dari motivasi STaM melakukan pengorganisasian, bagaimana pengorganisasian yang dilakukan, hingga kendala yang dihadapi dalam pengorganisasian. Informan dalam penelitian ditentukan dengan purposive sampling dengan mempertimbangkan apakah orang tersebut terlibat dalam pengorganisasian yang dilakukan STaM. Data yang digunakan yaitu data primer berupa wawancara langsung dan data sekunder yaitu dokumen dan foto. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi wawancara, hingga dokumentasi. Validitas menggunakan validitas sumber dan analisis data menggunakan model interaktif Milles and Huberman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Motivasi STaM Melakukan Pengorganisasian kepada Kelompok Tani untuk Memperjuangkan Perhutanan Sosial di Desa Mentasan, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap.

Motivasi menurut M. Utsman Najati dalam Abdul Rahman Shaleh (2009), adalah kekuatan penggerak yang membangkitkan aktivitas pada makhluk hidup dan menimbulkan tingkah laku untuk berbuat sesuatu menuju tujuan (kebutuhan) yang diinginkan. Dari pengertian Utsman Najati, peneliti mencoba melihat sesuatu yang mampu menggerakkan dan membangkitkan STaM melakukan pengorganisasian kepada kelompok tani untuk memperjuangkan perhutanan sosial di Desa Mentasan.

Chaplin dalam Abdul Rahman Shaleh–Muhbib Abdul Wahab (2004), membagi motivasi menjadi *psychological drive* dan *social motives*. Motivasi STaM melakukan pengorganisasian kepada kelompok tani untuk memperjuangkan perhutanan sosial merupakan *social motives* karena STaM melakukan pengorganisasian kepada kelompok tani akibat adanya dorongan-dorongan ingin berbuat baik dengan orang lain demi keadilan dan kesejahteraan petani di Kabupaten Cilacap.

Motivasi digolongkan menjadi tiga macam oleh Wood Worth dan Marquis dalam Abdul Rahman Shaleh-Muhbib Abdul Wahab (2013), yaitu motivasi yang didasari karena kebutuhan organis, motivasi darurat, dan motivasi objektif. Motivasi yang dilakukan oleh STaM tergolong dalam motivasi objektif yang diarahkan kepada objek atau tujuan tertentu di sekitar kita, karena STaM menuntut apa yang seharusnya menjadi hak petani sebagai warga negara Indonesia melalui perhutanan sosial.

Wood Worth juga mengklasifikasikan motivasi menjadi *unlearned motives* dan *learned motives* (Wahab, 2004). Motivasi STaM termasuk dalam *learned motives* yaitu motivasi yang timbul karena dipelajari, sebab STaM melakukan pengorganisasian kepada kelompok tani untuk memperjuangkan perhutanan sosial hasil belajar dari para aktivis reforma agraria, tokoh religius, maupun YLBHI.

Dirgagunarsa dalam Alex Sobur (2003), kebutuhan, tingkah laku, dan tujuan akan membentuk suatu lingkaran motivasi. Berikut tabel lingkaran motivasi STaM melakukan pengorganisasian kepada kelompok tani untuk memperjuangkan perhutanan sosial:

Tabel 3.1 Lingkaran Motivasi STaM untuk melakukan pengorganisasian kepada kelompok tani

Lingkaran Motivasi	Macam	Keterangan
Kebutuhan	Lahan untuk memenuhi kebutuhan hidup petani.	Sesuai dengan pasal 33 (3), pemerintah harusnya melakukan pendistribusian lahan, tetapi masih banyak terjadi monopoli lahan.
	Peraturan perundang-undangan yang mampu menguntungkan petani.	UU yang dibuat, seperti UU perkebunan dan UU sektoral lainnya hanya membela yang berduit dan memiliki kekuasaan.
	Legalitas lahan yang dikelola petani.	Selama ini petani mengelola lahan tanpa legalitas tanah yang jelas.
	Pendampingan untuk menyelesaikan konflik.	Pemerintah belum ada tindakan nyata untuk membantu petani menyelesaikan konflik.
	Memperbaiki kerusakan lingkungan hutan.	Perhutani dalam mengelola hutan menyebabkan hutan semakin rusak dan merugikan petani.
Tingkah Laku	Membentuk kelompok tani.	Sesuai dengan prasyarat pengajuan perhutanan sosial yaitu melalui kelompok masyarakat, gabungan kelompok tani hutan, atau koperasi.
	Menampung, menyalurkan, dan memperjuangkan aspirasi petani	Dilakukan oleh STaM melalui kegiatan rapat bersama dengan pengurus pusat dan cabang.
	Meningkatkan kualitas sumberdaya petani dan sumber daya alam.	Dilakukan oleh STaM melalui proses belajar bersama dengan petani dan jaringan yang dimiliki.
Tujuan	Membantu petani untuk memperoleh lahan.	Dengan adanya perhutanan sosial maka petani akan diberikan kesempatan untuk mengelola dan

		memanfaatkan lahan tersebut selama 35 tahun.
	Memperkuat posisi petani	Sesuai dengan hak pemegang IPHPS yaitu mendapat perlindungan dari gangguan perusakan dan pengambilalihan lahan secara sepihak.
	Membantu petani memberikan legalitas hak atas tanah.	Sesuai dengan bentuk kepemilikan lahan dalam perhutanan sosial yaitu pemohon akan diberikan tanda bukti pengelolaan berupa IPHPS (Izin Pemanfaatan Hutan untuk Perhutanan Sosial).
	Membantu petani menyelesaikan konflik agraria.	Sesuai dengan P. 39 bahwa pemohon IPHPS dapat menunjuk pendamping setempat yang berbadan hukum.
	Memperbaiki kerusakan lingkungan hutan.	Sesuai dengan kewajiban pemegang IPHPS yaitu harus menjaga arealnya dari perusakan dan pencemaran lingkungan.
	Mewujudkan kesejahteraan petani.	Sesuai dengan tujuan perhutanan sosial yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya.
	Menumbuhkan kepercayaan diri para petani.	Dilakukan dengan menciptakan ketokohan di level petani agar petani memiliki kemampuan untuk mengatasi permasalahan secara mandiri.

Pengorganisasian STaM pada Kelompok Tani dalam Memperjuangkan Reforma Perhutanan Sosial di Desa Mentasan, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap.

Pengorganisasian masyarakat menurut Rubin dan Rubin (1992) dalam Shragge (2013) yaitu pencaharian kekuatan sosial dan usaha untuk

melawan ketidakberdayaan melalui belajar secara personal maupun secara politik untuk meningkatkan kapasitas berdemokrasi dan menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan agar masyarakat lebih mampu beradaptasi dan pemerintahan dapat lebih bertanggungjawab.

Pengorganisasian masyarakat yang dilakukan oleh STaM pada kelompok tani merupakan pencaharian sosial dan suatu usaha untuk melawan ketidakberdayaan petani di desa Mentasan melalui proses sosialisasi baik secara personal maupun secara politik mengenai reforma agraria maupun perhutanan sosial guna menciptakan perubahan dalam kehidupan petani yang tadinya terkriminalisasi menjadi masyarakat yang mampu beradaptasi untuk lebih berani memperjuangkan haknya sebagai warga negara Indonesia. Pengorganisasian masyarakat yang dilakukan oleh STaM membawa petani untuk berjuang menghadapi masalah yang dihadapinya serta mendukung keputusan atau kebijakan yang mempengaruhi kehidupan petani. Dave Beckwith & Christina Lopez (1997), mengungkapkan bahwa ada tiga hal yang terkait dalam pengorganisasian masyarakat yakni: ada persoalan dan potensi untuk penyelesaian masalah; intervensi ke arah perubahan, dan; pihak yang terkait dalam intervensi masyarakat. Dari pendapat Dave Beckwith & Christina Lopez (1997), berikut tabel tiga hal yang terkait dalam pengorganisasian oleh STaM kepada kelompok tani di desa Mentasan.

Tabel 3.2 Tiga Hal yang terkait dalam Pengorganisasian Kelompok Tani di desa Mentasan

No	Tiga Hal dalam Pengorganisasian Masyarakat	Keterangan
1.	Ada persoalan dan potensi untuk penyelesaian masalah	
	Persoalan yang dihadapi petani: -Tindakan intimidasi dari perhutani memanfaatkan petani untuk menyewa lahan dan menanam pohon -Kuranganya kepedulian pemerintah desa terhadap permasalahan petani dan justru bekerjasama dengan perhutani; -Kerusakan hutan akibat pengelolaan yang salah oleh perhutani;	Potensi untuk penyelesaian masalah yaitu: Melakukan pendampingan kepada petani untuk mengusulkan perhutanan sosial demi meningkatkan kesejahteraan petani, memberantas tindakan intimidasi dari perhutani yang menerapkan sistem sewa, dan menjaga keseimbangan lingkungan dalam bentuk izin pemanfaatan hutan selama

		35 tahun dengan sistem bagi hasil.
2.	Intervensi ke arah perubahan	
	Dalam melakukan intervensi kepada kelompok tani, STaM menggunakan sosialisasi dan pelatihan.	Sosialisasi dan pelatihan diberikan kepada kelompok tani dengan tujuan: Meningkatkan kapasitas petani melalui belajar bersama agar petani sadar akan hak-haknya sehingga apabila terjadi kriminalisasi mereka berani melawan. Memperluas jaringan bagi petani. Memunculkan ketokohan dalam level petani untuk menciptakan keberanian.
3.	Pihak yang terkait dalam intervensi masyarakat	
	Dalam melakukan intervensi kepada kelompok tani, STaM melibatkan jaringan yang dimiliki.	Aktivis reforma agraria, LBH, KPA, LSM, JKPP, akademisi perguruan tinggi, Staff kepresidenan, BPN, DPR, dan DPRD.

Dalam melakukan pengorganisasian masyarakat, pengorganisir harus memiliki prinsip keberpihakan pada lapisan bawah, pendekatan holistik, pemberdayaan, tidak bertentangan dengan HAM, menciptakan kemandirian, berkelanjutan, partisipatif, keterbukaan, tanpa kekerasan, praxis, dan kesetaraan bagi semua pihak (PPSW, 2013). Berikut tabel prinsip STaM pada mengorganisir kelompok tani:

Tabel 3.3 Prinsip STaM dalam Melakukan Pengorganisasian pada Kelompok Tani di Desa Mentasan

No	Prinsip Pengorganisasian	Keterangan
1.	Keberpihakan	Pengorganisasian dilakukan pada petani yang termasuk lapisan bawah.
2.	Pendekatan Holistik	Pendekatan dilakukan secara menyeluruh mulai dari permasalahan yang dihadapi oleh petani, asal-usul lahan, hingga dampak kedepan bagi petani.
3.	Pemberdayaan	Sosialisasi dan pelatihan dilakukan agar petani menjadi berdaya menghadapi perhutani ketika terjadi tindakan kriminalisasi.
4.	Tidak Bertentangan dengan HAM	Sesuai dengan prinsip STaM yaitu bekerja atas prinsip HAM, kesetaraan pria dan wanita/gender dan keseimbangan lingkungan.

5.	Menciptakan Kemandirian	Sesuai dengan tujuan STaM yaitu menumbuhkan rasa kebersamaan para petani untuk mengatasi permasalahannya secara mandiri tanpa bergantung pada pihak lain.
6.	Berkelanjutan	Pembentukan kelompok tani sebagai jaminan keberlanjutan kegiatan.
7.	Partisipatif	Aktivis reforma agraria, LBH, KPA, LSM, JKPP, akademisi perguruan tinggi, Staff kepresidenan, BPN, DPR, dan DPRD dilibatkan untuk membantu proses pengajuan perhutanan sosial.
8.	Keterbukaan	Kegiatan dilakukan secara terbuka di balai desa Mentasan dengan mengundang berbagai pihak yang terlibat dalam pengajuan perhutanan sosial di desa tersebut.
9.	Tanpa Kekerasan	Pengorganisasian dilakukan secara baik-baik menggunakan cara sosialisasi, pelatihan, pendidikan.
10.	Praxis	Evaluasi dilakukan secara rutin di Mentasan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam pengajuan perhutanan sosial. Hal ini sesuai dalam kebijakan perhutanan sosial yang diwajibkan melakukan evaluasi paling sedikit lima tahun sekali.
11.	Kesetaraan	Hal ini sesuai dengan sifat STaM independen, demokratis, setara, dan adil pada tiap jenjang dalam pengambilan keputusan

PPSW (2013) mengungkapkan bahwa bentuk metode dan media pengorganisasian masyarakat dapat dilakukan melalui diskusi, pelatihan, bentuk aksi, serta kampanye dan sosialisasi. Berikut akan disajikan tabel terkait bentuk model dan media pengorganisasian yang dilakukan oleh STaM kepada kelompok tani di desa Mentasan.

Tabel 3.4 Bentuk Model dan Media Pengorganisasian oleh STaM pada kelompok tani di Mentasan

No	Bentuk Model dan Media Pengorganisasian	Keterangan
1.	Diskusi	Dilakukan secara terbuka untuk umum dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat (petani,

		pemerintah desa, pemerintah daerah, akademisi) maupun dilakukan secara tertutup hanya melibatkan pengurus kelompok tani.
2.	Pelatihan	Pelatihan cara bernegosiasi, pendataan, pemetaan, hingga pembuatan proposal untuk pengajuan perhutanan sosial.
3.	Bentuk aksi	Mengundang ahli tanaman untuk memberikan pelatihan secara langsung kepada petani agar petani memperoleh keuntungan dalam bercocok tanam.
4.	Kampanye dan Sosialisasi	Sosialisasi kebijakan perhutanan sosial dilakukan dengan mengundang berbagai pihak termasuk dari liputan 6 untuk publikasi.

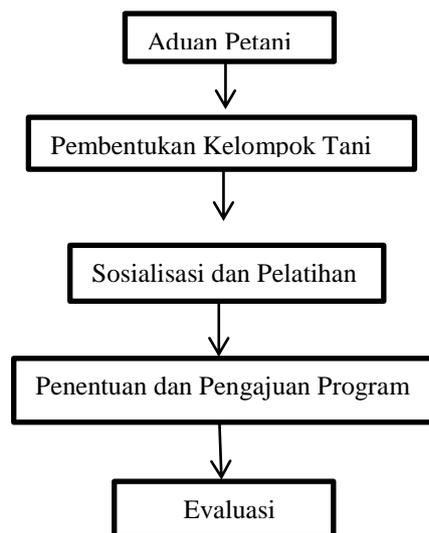
Adi Sasongko (1978) dalam Baharuddin (2013), mengungkapkan bahwa langkah-langkah dalam pengorganisasian masyarakat yaitu terdiri dari persiapan sosial, pelaksanaan, evaluasi, dan perluasan. Berikut tabel terkait langkah-langkah pengorganisasian masyarakat yang dilakukan oleh STaM pada kelompok tani di Desa Mentasan:

Tabel 3.5 Langkah-langkah Pengorganisasian kelompok tani di Desa Mentasan

No	Langkah Pengorganisasian	Keterangan
1.	Persiapan Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diawali dengan pengenalan ke masyarakat untuk menyampaikan maksud dan tujuan STAM melalui jalur formal maupun informal. 2. Mengenal masalah yang menjadi kebutuhan petani melalui diskusi formal (di balai desa dengan mengundang petani, pemerintah desa, DPRD, BPN, dan Perhutani) maupun secara informal (di rumah petani dengan ngobrol santai). Kemudian menjalin interelasi secara mendalam untuk menentukan prioritas penanggulangan masalah yang dihadapi petani di Mentasan. 3. Penyadaran masyarakat dengan menyadarkan petani terhadap masalah yang dihadapinya dengan ikut berpartisipasi menaggulangi masalah dengan memberikan masukan, pendidikan tentang perundang-undangan, dan pelatihan untuk bernegosiasi sesuai dengan potensi sumber daya.

2.	Pelaksanaan	Melaksanakan kegiatan pengajuan perhutanan sosial dengan melibatkan petani berdasarkan pertimbangan kemampuan, waktu, dan sumber daya yang dimiliki petani. Kegiatan yang dilakukan diawali dengan pembentukan kelompok tani, pendataan dan pemetaan, hingga pengajuan proposal.
3.	Evaluasi	Dilakukan selama kegiatan berlangsung dan setelah program selesai dilaksanakan dengan melakukan kunjungan rutin ke lokasi untuk memantau situasi, kondisi, perkembangan petani, serta untuk memperbaiki apa yang dirasa kurang.
4.	Perluasan	Perluasan dilakukan dengan menambah jumlah kegiatan dan meningkatkan kualitas kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga dapat meningkatkan kepuasan dari masyarakat.

Bagan 3.1 Tahapan Pengorganisasian STaM kepada Kelompok Tani di Desa Mentasan



Dari tahapan pengorganisasian yang dilakukan oleh STaM kepada kelompok tani di desa Mentasan dalam memperjuangkan perhutanan sosial, berikut tabel ringkasan pengorganisasian yang dilakukan STaM kepada kelompok tani di Desa Mentasan:

Tabel 3.6 Tahapan Pengorganisasian STaM kepada Kelompok Tani di Desa Mentasan

No	Tahapan Pengorganisasian	Keterangan
1.	Aduan Petani	Petani merasa terkriminalisasi dan butuh dampingan dari STaM ke jalur hukum karena kurangnya kepedulian pemerintah desa terhadap permasalahan yang dihadapi petani.

2.	Pembentukan Kelompok Tani	Untuk mempermudah pengorganisasian, mengingat sejarah, membentuk jaringan, dan sebagai syarat kelengkapan dalam proses pengajuan perhutanan sosial.
3.	Sosialisasi dan Pelatihan dengan Melibatkan Jaringan	Untuk membantu meningkatkan kapasitas petani melalui proses belajar bersama.
4.	Penentuan dan Pengajuan Program	Setelah mengetahui tipologi konflik yang terjadi, dengan mempertimbangkan riwayat tanah, maka akan ditentukan jalur penyelesaian. Di Mentasan, jalan keluar yang dapat diberikan yaitu melalui perhutanan sosial dengan membuat berita acara permohonan ke Kementerian terkait.
5.	Evaluasi	Dilakukan dengan kunjungan rutin ke lokasi yang menjadi dampingan untuk memantau situasi, kondisi, perkembangan petani, serta untuk memperbaiki yang kurang.

Terdapat aspek penting yang terkandung dalam pengorganisasian masyarakat menurut Ross Murray yaitu proses, masyarakat, dan berfungsinya masyarakat (Baharuddin, 2013). Berikut, tabel terkait aspek penting yang terkandung dalam pengorganisasian yang dilakukan oleh STaM pada kelompok tani di Desa Mentasan sebagai berikut:

Tabel 3.7 Aspek penting yang terkandung dalam pengorganisasian kelompok tani di Desa Mentasan

No	Aspek Penting	Keterangan
1.	Proses	Dengan mengadakan permasalahan yang dihadapinya kepada STaM. Artinya masyarakat, menyadari adanya kebutuhan dan merasa perlu diorganisir untuk memenuhi kebutuhannya.
2.	Masyarakat	Sekelompok petani di Mentasan yang mempunyai kebutuhan yaitu menginginkan pengelolaan hutan yang adil untuk kesejahteraannya.
3.	Berfungsinya Masyarakat	Banyak petani yang mempunyai inisiatif dan ikut membuat rencana kerja dalam pengajuan perhutanan sosial mulai dari bergabung dengan kelompok tani, membantu proses pendataan,

	pemetaan, hingga pengajuan proposal.
--	--------------------------------------

Kendala yang Dihadapi STaM dalam melakukan Pengorganisasian Kepada Kelompok Tani untuk Memperjuangkan Perhutanan Sosial di Desa Mentasan, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap.

Dalam melakukan pengorganisasian masyarakat, tentunya terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak pengorganisir. Hal tersebut juga berlaku untuk STaM selaku pihak pengorganisir. Oleh karena itu, penulis akan menyajikan tabel terkait kendala yang dihadapi STaM dalam melakukan pengorganisasian untuk memperjuangkan perhutanan sosial di Desa Mentasan, sebagai berikut:

Tabel 3. 8 Kendala STaM dalam Melakukan Pengorganisasian Kepada Kelompok Tani.

N0	Kendala yang Dihadapi	Keterangan
1.	Isu reforma agraria merupakan isu yang sangat sensitif untuk dibicarakan.	Karena terjadi pendistribusian ulang sehingga orang yang tadinya tidak memiliki tanah menjadi memiliki tanah dan begitupula sebaliknya. Akibatnya banyak sekali konflik yang harus dihadapi oleh STaM yang harus mempertaruhkan nyawa mereka.
2.	Kelompok tani banyak yang mengalami kejenuhan.	Kelompok tani harus berjuang bertahun-tahun tanpa adanya kepastian dengan harus mengorbankan harta benda, waktu, tenaga dan pikiran yang dimiliki. Bahkan terkadang petani sering terlibat konflik dengan pihak perhutani, pihak perkebunan, maupun dari pihak desa yang tidak menyetujui adanya reforma agrarian.
3.	Kurangnya kerjasama dari aparat pemerintahan.	Padahal sesuai dengan prasyarat penting untuk suksesnya reforma agraria yaitu harus ada kemauan politik dari pemerintah, harus dipisahkan elite penguasa dari elite bisnis dan parat birokrasi paham akan konsep dan tujuan reforma agraria.
4.	Kurangnya respon dari masyarakat untuk diajak bergerak bersama.	Hal ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan dan rasa ketakutan yang tinggi kepada perhutani jika garapannya dicabut oleh perhutani.

Penelitian ini menggunakan teori gerakan sosial dari Tarrow yang mendefinisikan gerakan sosial merupakan gerakan yang dilakukan sebagai politik perlawanan yang terjadi ketika rakyat biasa bergabung dengan para kelompok masyarakat yang lebih berpengaruh menggalang kekuatan untuk melawan para elit, pemegang otoritas, dan pihak lawan lainnya karena kebijakan yang ada tidak sesuai dengan keinginan (Mahfud, 2015). Dari definisi Tarrow, kita dapat melihat bagaimana para petani yang merupakan rakyat biasa bergabung dengan STaM untuk melawan kebijakan yang dirasa tidak sesuai dengan harapan petani.

Konteks gerakan sosial dari Tarrow adalah aksi kolektif yang melawan untuk mencapai tujuan bersama dengan dilakukan oleh orang-orang yang kurang memiliki akses ke institusi-institusi untuk mengajukan klaim baru atau klaim yang tidak dapat diterima oleh pemegang otoritas atau pihak-pihak yang ditentang lainnya (Mahfud, 2015). Hal ini dilihat dari aksi yang dilakukan petani bersama STaM untuk mencapai tujuan bersama yaitu keadilan dan kesejahteraan petani. Aksi tersebut dilakukan oleh petani yang kurang memiliki akses ke pemerintah yang sulit diterima perhutani.

Neil Smelser berpendapat bahwa perilaku kolektif dalam bentuk gerakan sosial merupakan efek samping dari transformasi sosial yang berjalan begitu cepat (Situmorang, 2013). Gerakan sosial yang dilakukan oleh STaM bersama petani merupakan efek samping dari transformasi sosial yang begitu cepat akibat adanya kebijakan dari pemerintah yang menyerahkan lahan hutan untuk dikelola oleh perhutani yang menyebabkan hutan semakin rusak. Gerakan STaM bersama petani mencerminkan ketidakmampuan dari pemerintah dalam memberikan keadilan kepada petani yang akhirnya menciptakan solidaritas antar petani yang senasib untuk bersama memperjuangkan kesejahteraan dan kemakmuran.

Komponen yang harus ada dalam gerakan sosial (Syabraini, 2013):

- 1) Kolektivitas orang yang bertindak bersama, yaitu gerakan sosial yang dilakukan oleh STaM bersama dengan para petani.
- 2) Tujuan bersama dan tindakannya adalah perubahan tertentu dalam masyarakat yang ditetapkan partisipan menurut cara yang sama, yaitu petani yang menginginkan perubahan dalam hidup mereka agar memiliki tanah untuk kesejahteraan hidup petani dengan

menggunakan cara berserikat dan bersatu mengajukan reforma agraria.

- 3) Kolektivitasnya relatif tersebar, tapi lebih rendah derajatnya dari organisasi formal, yaitu anggota kelompok tani tersebar di seluruh desa.
- 4) Tindakannya spontanitas, tak terlembaga, tak konvensional, seperti aksi protes yang dilakukan saat terjadi pembakaran gubuk.

Berikut pendorong tumbuh suburnya perilaku kolektif dalam gerakan sosial (Situmorang, 2013):

- 1) Adanya keterasingan sosial yang membuat individu mencari saluran untuk menyalurkan kefrustasiannya di dalam kerumunan massa yang beringas. Ketiadaan akses petani ke lembaga desa menyebabkan frustrasi, ketidakpuasan sehingga petani menemui STaM untuk meminta bantuan menuntut keadilan ke pemerintah.
- 2) Ketiadaan norma yang seringkali muncul ketika individu berada jauh dari ikatan struktur sosial. Ketiadaan aturan yang jelas membuat petani jauh dari struktur sosial seperti pemerintah desa karena dari pemerintah desa tidak peduli dengan permasalahan petani.
- 3) Lumpuhnya mekanisme kontrol sosial yang menyebabkan individu kehilangan kepercayaan terhadap sistem sosial yang ada dan kemudian berupaya mereformasi. Ketidakmauan pemerintah desa dalam membantu meredakan ketegangan yang dialami petani menyebabkan petani kehilangan kepercayaan pada pemerintah desa.
- 4) Nilai-nilai yang saling bersitegang dan bertabrakan. Kepentingan antara petani dengan negara yang berbeda dalam pengelolaan lahan

W.E Gettys (1948) dalam Mahfud (2013) mengungkapkan bahwa gerakan sosial melewati tahap-tahap berikut:

- 1) Tahap kegelisahan, yaitu terjadi ketika petani merasa terkriminalisasi dengan aturan sewa dan kerusakan hutan yang terjadi.
- 2) Tahap kegusaran, yaitu tahap kefrustasian petani dan meminta bantuan ke STaM.
- 3) Tahap formalisasi, yaitu tahap saat STaM bersama petani mulai menghimpun kekuatan untuk melawan Perhutani.

- 4) Tahap pelembagaan, yaitu tahap dimana sudah terbentuk kelompok tani dan mengajukan perhutanan sosial ke Kementrian.

KESIMPULAN

Motivasi STaM melakukan pengorganisasian kepada kelompok tani untuk memperjuangkan perhutanan sosial masuk ke dalam social motives (dorongan berbuat baik pada orang lain) dan digolongkan dalam motivasi objektif karena menuntut pada tujuan tertentu yaitu perhutanan sosial bagi petani. Terdapat lingkaran motivasi yang dialami oleh STaM hingga akhirnya melakukan pengorganisasian kepada kelompok tani yaitu karena adanya kebutuhan, tingkah laku, dan tujuan.

Adanya kebutuhan yaitu berupa redistribusi lahan bagi petani, peraturan perundang-undangan yang menguntungkan petani, legalitas lahan bagi petani, pendampingan untuk menyelesaikan konflik agraria, dan memperbaiki kerusakan lingkungan, menyebabkan suatu tingkah laku yaitu membuat kelompok tani dengan tujuan membantu petani dalam memperoleh lahan, memperkuat posisi, memperoleh legalitas lahan, menyelesaikan konflik agraria, memperbaiki kerusakan lingkungan, mewujudkan kesejahteraan, dan menumbuhkan kepercayaan diri petani.

Pengorganisasian yang dilakukan STaM kepada kelompok tani merupakan suatu usaha untuk melawan ketidakberdayaan yang dialami petani di desa Mentasan melalui proses sosialisasi guna menciptakan perubahan agar petani mampu beradaptasi dengan segala permasalahan yang dihadapi. Pengorganisasian juga dilakukan karena adanya persoalan yang dihadapi petani (tindakan intimidasi dari perhutani, kurangnya kepedulian pemerintah desa, dan kerusakan lingkungan hutan) dan potensi penyelesaian masalah (melakukan pendampingan kepada petani untuk mengusulkan perhutanan sosial), intervensi ke arah perubahan yang diinginkan (peningkatan kapasitas petani agar sadar akan hak-haknya, memperluas jaringan petani, dan memunculkan ketokohan dalam level petani), dan adanya pihak yang terlibat dalam intervensi yaitu jaringan yang dimiliki STaM.

Dalam melakukan pengorganisasian, STaM menerapkan prinsip keberpihakan pada petani, pendekatan secara holistik terhadap permasalahan

yang dihadapi petani, pemberdayaan, tidak bertentangan dengan HAM, menciptakan kemandirian pada petani, berkelanjutan dengan membentuk kelompok tani, partisipatif dengan melibatkan beberapa jaringan, keterbukaan dengan semua lapisan, tanpa kekerasan, praxis, dan kesetaraan.

Bentuk model dan media pengorganisasian yang dilakukan oleh STaM melalui diskusi, pelatihan, bentuk aksi, kampanye dan sosialisasi. Pengorganisasian yang dilakukan oleh STaM berawal dari aduan petani yang merasa terkriminalisasi dan butuh dampingan ke jalur hukum, setelah aduan diterima akan dibentuk kelompok tani, kemudian dilakukan sosialisasi dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas petani dengan melibatkan jaringan yang dimiliki STaM, setelah itu menentukan penyelesaian dan program apa yang diberikan kepada petani, dan yang terakhir melakukan evaluasi rutin.

Terdapat kendala yang dialami oleh STaM dalam melakukan pengorganisasian yaitu isu reforma agraria merupakan isu yang sangat sensitif, kelompok tani banyak yang mengalami kejenuhan, kurangnya kerjasama dari aktor-aktor pemerintahan, dan kurangnya respon dari masyarakat untuk diajak bergerak bersama menuju perubahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Baharuddin. 2015. Pengorganisasian Masyarakat. <http://baharbtp.blogspot.com/2015/03/pengorganisasian-masyarakat.html?m=1>. 15 Novemver 2019 (12:59).
- Firdaus, A. Y. 2018. Panduan Praktis Penerapan Kebijakan Perhutanan Sosial: Kerangka PENCEPATAN Reformasi Tenurial Hutan. Bogor. CIFOR.
- Hardiyanto, Barid. 2015. Jalan Menuju Hutan Subur, Rakyat Makmur. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kartika, D., D. Furqon., dkk. 2016. Buku Putih Reforma Agraria (Reforma Agraria Mewujudkan Kemandirian Bangsa). Jakarta Selatan. Konsorsium Pembaruan Agraria.

- Kementerian Komunikasi dan Informatika. 2017. Perhutanan Sosial, Kini Masyarakat Legal Mengelola Hutan. Biro Humas KLHK. https://www.kominfo.go.id/content/detail/10564/perhutanan-sosial-kini-masyarakat-legal-mengelola-hutan/0/artikel_gpr. 20 Oktober 2019 (22.02).
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 39 Tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial.
- Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.
- Putra, F., dkk. 2016. Gerakan Sosial. Malang. Averrors Press.
- Ridlo, M. 2019. Perjuangan Petani Cilacap Peroleh Tanah yang Dijanjikan. <https://m.liputan6.com/regional/read/3914385/perjuangan-petani-cilacap-peroleh-tanah-yang-dijanjikan>. 27 Oktober 2019 (21:22).
- Sarwono, W. S. 2009. Pengantar Psikologi Umum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Senoaji, G. 2019. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan Lindung Bukit Daun di Bengkulu. Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. *Jurnal Sosiohumaniora*, 13 (1) : 1-17.
- Shaleh, A, R. 2009. Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam. Jakarta. Prenada Media.
- Shragge, E. 2013. Pengorganisasian Masyarakat untuk Perubahan Sosial. Yogyakarta. Graha Ilmu
- Situmorang, A. W. 2013. Gerakan Sosial Teori dan Praktik (Edisi Revisi). Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Sobur, A. 2003. Psikologi Umum. Bandung. CV Pustaka Setia.
- Steinlin, H. 1988. Menuju Kelestarian hutan. Seri Studi Pertanian Kerjasama Jerman dan Indonesia. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.
- Syarbaini, S. 2013. Dasar-Dasar Sosiologi. Yogyakarta. Graha Ilmu.

- Wahab, A. R. S. A. 2004. Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam. Jakarta. Prenada Media.
- Winata, D. K. 2019. KLHK Identifikasi Ribuan Desa di Kawasan Hutan https://m.mediaindonesia.com/amp/amp_detail/221945-klhk-identifikasi-ribuan-desa-di-kawasan-hutan#aoh=15725705588724&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=Dari%20%251%24s 28 Oktober 2019 (14:04).
- Wiradi, G. 1995. Reforma Agraria Untuk Pemula. Jakarta. Sekretariat Bina Desa.